

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ajik Sujoko, *Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020).
- Bagir Manan, *Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional*, (Malang: Setara Press, 2023).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (New Jersey: The Lawbook Exchange, 2022).
- Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023).
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- H. Soediman, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022).
- Ibrahim Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- J.H. Nieuwenhuis, dalam *Modul Kebijakan Kontrak Konstruksi*, (Jakarta: Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- John Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Fifth Edition, (London: Sage Publications, 2022).
- Lawrence Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Lon Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 2018).
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022).

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

Soedikno Mertokusumo, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019).

_____, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2016).

Jurnal:

Alan Schwartz and Robert E. Scott. “*Obsolescence: The Intractable Production Problem in Contract Law*”, *Columbia Law Review* 121, no. 7 (2021).

Abustan, “Relasi Lembaga Negara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04, No. 02, (2017).

Budhayati, C.T., “Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak dalam Perspektif KUHPerdara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2017): 112–125.

Imani, Mayangsari Nurul dan Rosa Agustina, “Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2020).

Latada, et al., “Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Flyover*, Vol. 2, No. 1, (2022).

Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepindo*, Vol. 01, No. 01, (2019).

Mark Fenwick & Stefan Wrba, “*The Shifting Meaning of Legal Certainty*”, Springer, (2016).

Nadya, Zora Riz dan Khairani, “Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh dengan CV. Harkat Aneuk Nanggroe”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 1, (2018).

Nyoman G R., “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2014).

Robert Alexy, “*Legal Certainty and Correctness*”, *Ratio Juris*, Vol. 28, No. 4, (2015).

Patricia Popelier, “*Five Paradoxes on Legal Certainty and the Lawmaker*”, *Legisprudence*, Vol. 2, no.1 (2015) : 47–66. DOI: 10.1080/17521467.2008.11424673.

Widodo Dwi Putro, “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”, Genta Publishing, (2011).

Wiguna, M. O. C., “Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, (2023): 794-805. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.374>.

W. Van Dunne & E. Schipper, “*Principles of Contract Law*”, Oxford University Press, (2014).

Yunanto, H., “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda dalam Sengketa yang Dilandasi Perjanjian”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, (2020): 87–98.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Putusan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 174/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2025).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1796 K/Pdt/2015 tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi.

Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl tentang Sengketa Perjanjian Konstruksi.

Kitab Undang-Undang:

KUH Perdata. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).

Website/Internet:

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, “Seluruh Pelaku Industri Konstruksi Harus Bersinergi dalam Menjawab Tantangan Jasa Konstruksi.” <https://binakonstruksi.pu.go.id>, diakses pada 13 Maret 2025.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi (2017), https://simantu.pu.go.id/epel/edok/4e50d_319549Modul_02_-_Pengetahuan_Dasar_Kontrak_Konstruksi.pdf, diakses pada 13 Maret 2025.

M. Nurdin, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Jalan Damai di Luar Pengadilan”, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar-Pengadilan.html>, diakses pada 13 Maret 2025.

Kamus:

Efendi, Jimly dan Lutfianingsih, F.F.W.I.G., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).